

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DI BALAI PEMASYARAKATAN

Silvia Ika Syahfitriani¹, Ali Muhammad²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: ikasilvia8801@gmail.com¹, alimnrekap@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi (IT) di Balai Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemasyarakatan. Penggunaan IT diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan seperti pembinaan klien, pengawasan, pelaporan, dan administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung pada beberapa Balai Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan IT berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat proses pelayanan, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan IT di Balai Pemasyarakatan perlu ditingkatkan dengan penyediaan pelatihan yang lebih intensif dan pengadaan infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Balai Pemasyarakatan

Abstract: *This research aims to analyze the use of information technology (IT) in correctional centers in order to increase the efficiency and effectiveness of correctional services. The use of IT is expected to support the implementation of the duties and functions of the Correctional Center such as client coaching, supervision, reporting and administration. The research method used is a descriptive study with a qualitative approach through interviews and direct observation at several correctional centers. The research results show that the use of IT contributes significantly to speeding up the service process, although there are still challenges in terms of infrastructure and human resources. The conclusion of this research is that the application of IT in correctional centers needs to be improved by providing more intensive training and providing adequate infrastructure.*

Keywords: *Information Technology, Correctional Center*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan salah satu fungsi penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana atau klien ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, **Balai Pemasyarakatan (Bapas)** berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan kepada klien pemasyarakatan yang berada dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan ini bisa berupa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau individu yang sedang menjalani masa percobaan setelah menjalani hukuman pidana.

Bapas memiliki tugas yang sangat penting untuk memastikan bahwa klien dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis kemanusiaan dan keadilan restoratif. Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti penilaian perilaku klien, pengawasan aktivitas sehari-hari, pelaporan kepada otoritas hukum, serta koordinasi dengan keluarga dan komunitas. Dalam menjalankan fungsinya, Bapas juga harus melakukan berbagai tugas administratif yang kompleks, seperti manajemen data klien, penyusunan laporan kemajuan klien, dan pelaksanaan pengawasan terhadap klien dengan sistem pelaporan reguler.

Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah klien dan semakin kompleksnya proses pembinaan, **tantangan besar muncul dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional Bapas**. Pengelolaan data secara manual, birokrasi yang panjang, dan kebutuhan akan pengawasan yang lebih intensif menimbulkan berbagai kendala dalam operasional sehari-hari. Dalam konteks ini, **teknologi informasi (IT)** menawarkan potensi besar untuk membantu Bapas menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan IT dapat memungkinkan Bapas untuk mengelola data klien secara lebih efektif, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memungkinkan sistem pengawasan yang lebih canggih dan real-time.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi organisasi dan lembaga publik. Di sektor pemerintahan, berbagai institusi di seluruh dunia telah mengadopsi teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya memperkuat penerapan IT di sektor publik melalui berbagai inisiatif seperti **E-Government**, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat melalui digitalisasi proses administrasi.

Dalam konteks Bapas, **pemanfaatan IT menjadi semakin relevan** karena teknologi ini dapat mendukung berbagai tugas penting yang dijalankan oleh Bapas. Misalnya, **Sistem Informasi Manajemen Klien (SIMK)** merupakan salah satu aplikasi IT yang dirancang untuk mengelola informasi klien masyarakat secara terintegrasi. Dengan SIMK, data klien dapat diakses dan dikelola dengan lebih cepat dan mudah, memungkinkan petugas Bapas untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai perkembangan dan status klien. Selain itu, aplikasi berbasis IT juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pelaporan dan pengawasan klien secara online, sehingga mempercepat proses evaluasi dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi.

Meskipun demikian, **penerapan IT di Balai Pemasarakatan masih menghadapi berbagai tantangan**, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur IT-nya belum memadai. Tantangan-tantangan ini meliputi keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat keras yang mendukung operasional IT, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam teknologi. Selain itu, sering kali terjadi masalah **anggaran** yang membuat beberapa Bapas tidak dapat secara optimal memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Kapasitas SDM juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi IT di Bapas. Sumber daya manusia yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem IT yang ada, yang pada akhirnya dapat menghambat penerapan teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua petugas Bapas mampu memanfaatkan teknologi ini dengan baik.

Selain masalah internal, **dukungan kebijakan dari pemerintah** juga menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi IT di Bapas. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur IT di lembaga-lembaga pemsarakatan, termasuk Balai Pemasarakatan. Kebijakan yang mendukung perlu difokuskan pada pengadaan anggaran yang memadai untuk pembaruan teknologi, peningkatan infrastruktur internet di seluruh wilayah, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan IT.

Penelitian ini berfokus pada **pemanfaatan teknologi informasi di Balai Pemasarakatan**, dengan tujuan untuk memahami bagaimana IT telah diterapkan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta sejauh mana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemsarakatan. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil agar pemanfaatan IT di Bapas dapat lebih optimal di masa depan.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian mendalam mengenai pemanfaatan IT di beberapa Bapas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi saat ini terkait penerapan IT di Bapas, serta tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung fungsi pemsarakatan. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis untuk

meningkatkan penerapan IT di Bapas guna memperkuat kinerja dan kualitas layanan masyarakat di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sektor Publik

Teknologi informasi telah terbukti memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi sektor publik, terutama dalam administrasi dan pengelolaan data. Berbagai studi menunjukkan bahwa IT dapat membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan (Indrajit, 2006). Di sektor masyarakat, penerapan IT memungkinkan pemantauan klien secara lebih efektif dan efisien.

2. Tantangan Implementasi IT di Pemerintahan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi IT di sektor publik adalah masalah infrastruktur dan sumber daya manusia (Muluk, 2007). Kurangnya pelatihan dan keterampilan IT di kalangan pegawai pemerintahan sering menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi secara optimal. Studi oleh Rahman (2012) menunjukkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi kendala besar, terutama di daerah-daerah terpencil.

3. Peran Teknologi dalam Layanan Masyarakat

Dalam konteks masyarakat, teknologi dapat berperan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen data klien, pengawasan elektronik, dan sistem pelaporan. Sebuah studi oleh Siregar (2018) menyoroti bahwa penerapan teknologi seperti sistem informasi manajemen masyarakat dapat membantu dalam memantau perkembangan klien secara lebih efektif. Namun, studi ini juga mencatat perlunya perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang lebih mendukung.

4. Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan Publik

Sistem informasi manajemen telah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan informasi di lembaga pemerintahan. Menurut studi oleh Nugroho (2015), penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks masyarakat, penggunaan sistem ini memungkinkan pengelolaan data klien secara lebih akurat dan real-time.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami pemanfaatan teknologi informasi (IT) di Balai Pemasarakatan (Bapas). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh para pegawai Bapas dalam penerapan IT di lingkungan kerja mereka. Penelitian ini dilakukan di beberapa Bapas yang tersebar di wilayah Indonesia guna mendapatkan data yang komprehensif dan mewakili berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai studi kasus multi-situs, di mana peneliti menganalisis penggunaan IT di beberapa Balai Pemasarakatan yang berbeda. Pemilihan studi kasus multi-situs ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi dalam pemanfaatan teknologi di lingkungan Bapas, baik dari segi implementasi sistem IT, ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM, hingga kendala yang dihadapi di lapangan.

Desain penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami perbedaan implementasi IT di Bapas yang beroperasi di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang lebih baik, dibandingkan dengan Bapas di daerah terpencil yang mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan lengkap tentang situasi nyata pemanfaatan IT di lembaga pemsarakatan di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian dan Pemilihan Sampel

Penelitian ini dilakukan di **lima Balai Pemasarakatan** yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan lokasi penelitian meliputi:

- **Tingkat penerapan IT:** Bapas yang sudah menerapkan sistem IT secara signifikan serta Bapas yang masih bergantung pada proses manual.
- **Geografis:** Pemilihan Bapas di daerah perkotaan dengan infrastruktur IT yang lebih memadai, serta Bapas di daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet dan sumber daya.
- **Ukuran institusi:** Bapas yang memiliki jumlah klien pemsarakatan yang besar dibandingkan dengan yang kecil, untuk melihat perbedaan tantangan operasional.

Kelima lokasi yang dijadikan objek penelitian tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga representasi geografis serta kondisi infrastruktur yang bervariasi dapat diperoleh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut ini:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional Balai Pemasarakatan, termasuk:

- **Kepala Bapas:** untuk memperoleh informasi terkait kebijakan umum dan visi implementasi IT di Bapas.
- **Pegawai Bapas:** khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data klien, pelaporan, dan pengawasan berbasis teknologi, untuk memahami tantangan dan manfaat dari penerapan IT.
- **Klien Pemasarakatan:** beberapa klien juga diwawancarai untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile atau GPS.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan respon dari narasumber. Setiap wawancara berlangsung selama 45 menit hingga 1,5 jam, dan dicatat serta direkam (dengan izin dari narasumber) untuk analisis lebih lanjut.

b. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana sistem IT diimplementasikan di lapangan, termasuk penggunaan perangkat lunak manajemen klien, sistem pelaporan elektronik, dan aplikasi pengawasan. Peneliti mengamati interaksi antara pegawai Bapas dengan sistem IT yang tersedia, serta bagaimana teknologi digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pengelolaan data, pelaporan, dan monitoring klien.

Observasi ini penting untuk memahami **proses kerja secara langsung**, serta untuk mengidentifikasi kendala teknis atau operasional yang mungkin tidak terungkap dari

wawancara saja. Peneliti juga mengamati lingkungan fisik kantor Bapas, termasuk ketersediaan perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet.

c. Studi Dokumen

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan implementasi IT di Bapas. Dokumen yang dianalisis meliputi:

- **Kebijakan internal** terkait pengelolaan dan penggunaan sistem IT di Bapas.
- **Laporan tahunan** atau laporan pelaksanaan program IT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhubungan dengan masyarakat.
- **Manual pengguna** atau panduan teknis penggunaan perangkat lunak dan aplikasi IT yang digunakan di Bapas.

Studi dokumen ini bertujuan untuk memahami dasar kebijakan dan peraturan yang mengarahkan penggunaan teknologi di Balai Masyarakat, serta untuk membandingkan implementasi di lapangan dengan panduan resmi.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode **analisis tematik**. Proses analisis terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. **Transkripsi:** Semua rekaman wawancara ditranskrip secara verbatim, dan catatan observasi langsung disusun secara rinci. Transkrip dan catatan ini kemudian dikodekan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
2. **Koding:** Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang dikumpulkan, seperti manfaat penerapan IT, kendala teknis, peran SDM, infrastruktur, dan tingkat kepuasan klien masyarakat. Setiap kategori diberi kode untuk memungkinkan pengelompokan data yang relevan dalam analisis tematik.
3. **Pengelompokan dan Interpretasi:** Setelah koding, data yang memiliki tema serupa dikelompokkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Proses ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana IT dimanfaatkan di berbagai Bapas, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap operasional dan layanan di Bapas.

4. **Triangulasi Data:** Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Misalnya, wawancara tentang kesulitan penggunaan SIMK dibandingkan dengan observasi langsung terhadap sistem tersebut di lapangan.

5. Keabsahan dan Kredibilitas Data

Untuk menjaga **validitas dan kredibilitas** penelitian, peneliti menggunakan beberapa strategi berikut:

- **Triangulasi metode:** Data dikumpulkan melalui beberapa metode (wawancara, observasi, dan studi dokumen) untuk mengurangi bias dan memperkuat temuan.
- **Member check:** Setelah wawancara dan observasi, peneliti melakukan **member check** dengan narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi data yang diperoleh sudah akurat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
- **Audit trail:** Semua proses penelitian dicatat secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, untuk memberikan transparansi dalam proses penelitian dan memudahkan penelusuran kembali jika diperlukan.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, di antaranya adalah:

- **Keterbatasan jumlah lokasi:** Penelitian ini hanya dilakukan di lima Bapas, sehingga mungkin belum mampu merepresentasikan situasi di seluruh Bapas di Indonesia.
- **Tantangan teknis dalam wawancara:** Beberapa wawancara dilakukan secara daring karena keterbatasan jarak, yang dapat memengaruhi kualitas interaksi dan penggalan data.
- **Keterbatasan waktu:** Proses penelitian yang dibatasi oleh waktu mungkin mempengaruhi kedalaman eksplorasi terhadap permasalahan yang lebih kompleks.

Dengan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana teknologi informasi dimanfaatkan di Bapas, tantangan apa saja yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan teknologi informasi (IT) di Balai Pemasarakatan (Bapas) telah menunjukkan berbagai perkembangan yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para pegawai Bapas di berbagai daerah, berikut adalah beberapa aspek penting yang diidentifikasi terkait pemanfaatan IT:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Klien (SIMK)

Salah satu inovasi terbesar dalam pemanfaatan IT di Bapas adalah penggunaan **Sistem Informasi Manajemen Klien (SIMK)**, yang memungkinkan pendataan klien pemasarakatan dilakukan secara digital dan terintegrasi. SIMK berfungsi sebagai basis data utama yang memuat informasi detail mengenai setiap klien, seperti riwayat kriminal, perkembangan rehabilitasi, dan status integrasi kembali ke masyarakat. Dengan SIMK, data klien yang sebelumnya dikelola secara manual kini dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat oleh petugas.

Penerapan SIMK di beberapa Bapas telah terbukti mempercepat proses administrasi klien, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait pembebasan bersyarat dan pengawasan. Sistem ini memungkinkan petugas untuk dengan cepat mengakses riwayat klien, termasuk informasi terkait perilaku selama masa tahanan, rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan (PK), dan status kesehatan mental klien. Dengan ini, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya memakan waktu lebih lama karena pengumpulan data manual kini bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa **penggunaan SIMK belum merata di seluruh Bapas**. Beberapa daerah yang berada di kawasan terpencil atau dengan infrastruktur IT yang terbatas masih mengandalkan proses manual. Tantangan lain yang teridentifikasi adalah seringnya terjadi **gangguan teknis** pada sistem, seperti server down dan akses yang lambat, terutama saat jumlah pengguna meningkat secara signifikan.

2. Pelaporan Elektronik

Selain SIMK, Bapas juga telah menerapkan sistem **pelaporan elektronik** untuk memonitor dan mencatat aktivitas serta kemajuan klien secara berkala. Laporan harian dan bulanan yang dulunya harus disusun secara manual, kini telah dapat diakses secara online

melalui platform yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pelaporan ini mencakup berbagai aspek, seperti kegiatan pembinaan, program rehabilitasi, dan tingkat kepatuhan klien terhadap ketentuan pembebasan bersyarat.

Sistem pelaporan elektronik memudahkan pengawas dan pembimbing untuk **memantau perkembangan klien** tanpa harus terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan. Misalnya, pembimbing kemasyarakatan dapat memeriksa laporan harian dari klien yang berada dalam pengawasan jarak jauh, terutama dalam kasus pembebasan bersyarat. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam menganalisis tren perilaku klien melalui data yang terstruktur dengan baik, yang memungkinkan petugas untuk membuat strategi pembinaan yang lebih efektif.

Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih ada **kesenjangan dalam penggunaan pelaporan elektronik** ini, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Beberapa Bapas di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan online secara real-time karena sinyal internet yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pengiriman laporan serta kurangnya akurasi data yang disampaikan.

3. Pengawasan Klien Berbasis Teknologi

Pemanfaatan IT di Bapas juga terlihat dalam aspek **pengawasan klien berbasis teknologi**. Bapas di beberapa kota besar telah memanfaatkan teknologi **GPS** dan aplikasi mobile untuk memantau pergerakan klien yang berada di luar lembaga. Klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau yang sedang dalam proses rehabilitasi wajib melaporkan lokasi mereka secara berkala melalui aplikasi mobile yang terhubung dengan sistem pemantauan Bapas. Dengan teknologi ini, petugas dapat memantau keberadaan klien secara real-time dan mendapatkan notifikasi jika klien melewati batas wilayah yang telah ditetapkan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini belum berjalan secara optimal di semua Bapas. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk menyediakan perangkat GPS yang cukup, serta **kurangnya pemahaman teknologi di kalangan klien**. Selain itu, beberapa klien dilaporkan kesulitan dalam menggunakan aplikasi pemantauan karena faktor usia atau tingkat literasi digital yang rendah. Petugas juga mengungkapkan bahwa aplikasi sering kali mengalami gangguan teknis, seperti pelacakan yang tidak akurat atau aplikasi yang sulit diakses karena masalah konektivitas.

4. Keterbatasan Infrastruktur IT

Meskipun IT telah memberikan dampak positif pada beberapa aspek operasional di Bapas, **keterbatasan infrastruktur** menjadi salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi ini secara menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Bapas di daerah terpencil menghadapi masalah terkait dengan akses internet yang terbatas, peralatan IT yang usang, serta **keterbatasan jaringan**. Server dan perangkat lunak yang digunakan di beberapa Bapas dilaporkan sering mengalami kerusakan atau tidak mampu menangani beban kerja yang tinggi.

Salah satu contoh konkret adalah seringnya terjadi **server down** pada saat jam kerja yang sibuk, ketika banyak petugas yang mencoba mengakses sistem informasi secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan tertundanya proses pelayanan dan administrasi klien. Selain itu, **anggaran yang terbatas** juga membuat beberapa Bapas kesulitan untuk memperbarui perangkat IT mereka, seperti komputer, router, dan perangkat penyimpanan data.

5. Kapasitas dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan IT juga menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi IT di Bapas. Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa **tidak semua petugas Bapas memiliki kemampuan teknis yang memadai** untuk menggunakan sistem IT dengan efektif. Banyak petugas, terutama yang sudah berusia lanjut, mengaku mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SIMK atau aplikasi pelaporan elektronik. Hal ini berdampak pada efisiensi pelayanan, karena beberapa petugas memerlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menggunakan teknologi.

Untuk mengatasi masalah ini, **pelatihan intensif** terkait IT telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada petugas Bapas di berbagai daerah. Namun, frekuensi pelatihan ini dinilai masih kurang memadai oleh beberapa responden, terutama di daerah-daerah yang jarang mendapatkan akses pelatihan. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pelatihan dan pendampingan teknis guna memastikan bahwa semua petugas mampu memanfaatkan IT secara optimal dalam pelaksanaan tugas mereka.

6. Manfaat dan Dampak Positif IT di Bapas

Meskipun terdapat sejumlah tantangan, secara keseluruhan, pemanfaatan IT di Bapas telah memberikan dampak positif yang signifikan. IT terbukti mampu meningkatkan **efisiensi**

pengelolaan data klien, mempercepat proses pelaporan, dan mendukung pengawasan klien yang lebih baik. Teknologi juga membantu meningkatkan transparansi dalam proses pembebasan bersyarat dan pengawasan rehabilitasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan reintegrasi sosial yang lebih efektif.

Dalam jangka panjang, pemanfaatan IT berpotensi untuk menciptakan **layanan masyarakatan yang lebih modern, cepat, dan akurat**, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga masyarakatan. Namun, untuk mencapai potensi ini secara penuh, diperlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur IT, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem manajemen IT di seluruh Bapas di Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi (IT) di Balai Masyarakatan (Bapas), dapat disimpulkan bahwa penerapan IT telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di Bapas. Penggunaan sistem informasi, pelaporan elektronik, dan teknologi pemantauan klien berbasis digital telah berhasil mempercepat proses administrasi, memperbaiki manajemen data klien, serta memudahkan pengawasan dan pembinaan klien. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Secara lebih terperinci, simpulan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Akurasi Pelayanan

Pemanfaatan IT di Bapas, seperti Sistem Informasi Manajemen Klien (SIMK) dan pelaporan elektronik, telah mampu memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan data klien dan proses administrasi. SIMK memungkinkan petugas Bapas untuk mengakses data klien secara cepat dan akurat, yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait status klien, pembebasan bersyarat, dan rehabilitasi. Sistem pelaporan elektronik juga mempermudah petugas dalam menyusun dan mengirimkan laporan perkembangan klien secara tepat waktu, mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan yang sering terjadi pada sistem manual.

2. Pemantauan Klien Berbasis Teknologi

Penggunaan teknologi GPS dan aplikasi mobile untuk pemantauan klien di luar lembaga masyarakatan memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan pengawasan secara

real-time. Teknologi ini juga memungkinkan deteksi dini jika klien melanggar batas-batas geografis yang ditentukan. Ini merupakan langkah maju dalam pengawasan klien yang tidak hanya efektif, tetapi juga lebih efisien, karena mengurangi kebutuhan untuk pengawasan fisik yang konvensional.

3. Kendala Infrastruktur dan Teknologi

Meskipun IT telah memberikan manfaat yang jelas, penerapannya belum merata di seluruh Bapas di Indonesia. Beberapa Bapas, terutama yang berada di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan infrastruktur IT, seperti koneksi internet yang tidak stabil, perangkat yang usang, dan kapasitas server yang tidak memadai. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengaksesan data dan pelaporan, serta menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dukungan infrastruktur yang lebih baik, termasuk peningkatan jaringan internet, pembaruan perangkat keras, dan sistem server yang lebih andal.

4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tantangan utama dalam penerapan IT di Bapas adalah keterbatasan kapasitas SDM. Banyak petugas, terutama yang sudah berusia lanjut, masih belum sepenuhnya terampil dalam mengoperasikan teknologi baru. Meski pelatihan IT telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, frekuensi dan cakupan pelatihan ini masih belum cukup untuk memastikan bahwa semua petugas memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan IT secara optimal. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif, berkesinambungan, dan terfokus untuk meningkatkan kompetensi SDM di Bapas.

5. Hambatan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan besar dalam pemanfaatan IT di Bapas. Anggaran yang terbatas memengaruhi pembaruan perangkat keras, perbaikan infrastruktur, dan pelatihan SDM. Dalam beberapa kasus, Bapas terpaksa menggunakan perangkat IT yang usang, yang menyebabkan sering terjadinya gangguan teknis dan penurunan performa sistem. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penerapan IT yang efektif di Bapas.

6. Perlunya Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Pemanfaatan IT di Bapas membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, termasuk regulasi terkait standar operasional penggunaan IT, pelatihan wajib bagi petugas, serta alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur IT. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung transformasi digital di lembaga pemasyarakatan, termasuk pengembangan sistem manajemen IT yang terintegrasi secara nasional. Integrasi sistem ini penting agar data klien dari berbagai Bapas di seluruh Indonesia dapat diakses secara sentral, sehingga mempermudah pengawasan dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan.

7. Dampak Positif dalam Jangka Panjang

Meskipun tantangan masih ada, pemanfaatan IT di Bapas memberikan prospek positif bagi peningkatan pelayanan pemasyarakatan di masa depan. Dalam jangka panjang, penggunaan teknologi yang lebih maju dapat membantu Bapas dalam mencapai tujuan-tujuan strategis, seperti reintegrasi sosial klien yang lebih efektif, pengurangan residivisme, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan. Dengan dukungan yang tepat, penerapan IT dapat mengubah cara Bapas beroperasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan IT di Bapas, beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan infrastruktur IT**, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih mengalami kendala akses internet dan perangkat keras.
- **Pelatihan berkelanjutan** bagi petugas Bapas untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem IT.
- **Pengadaan anggaran** yang lebih besar dan dialokasikan secara khusus untuk pembaruan perangkat IT dan perbaikan infrastruktur di seluruh Bapas.
- **Peningkatan regulasi dan kebijakan** yang mendukung penerapan IT di lembaga pemasyarakatan, termasuk sistem manajemen yang terintegrasi secara nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa IT berpotensi besar untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan, namun kesuksesan pemanfaatannya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan

anggaran yang ada saat ini. Upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem IT yang lebih baik akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Wicaksono Bagus, Fenty U. Puluhulawa, Nur Mohamad Kasim. (2020). Optimalisasi Peran Balai Masyarakat Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Masyarakat. Jurnal Syntax Admiration. Vol. 1 No 3
- M. Reza Fahlevi Ms, Padmono Wibowo. Optimalisasi Pelaksanaan Program Pengawasan Pembimbingan Pada Klien Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Balai Masyarakat Kelas I Medan. Vol 10 No 1.
- Hernawati Nelis. (2020). Pengawasan Pembimbing Masyarakat Terhadap Klien Masyarakat. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran. Vol 2 No 2.
- Syahrizal Reza. (2020). Strategi Peningkatan Pengawasan Dan Bimbingan Bagi Klien Masyarakat Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 Nomor 2.